

BAB II

UNITED NATIONS CENTRE FOR REGIONAL DEVELOPMENT

A. Pengertian UNCRD

Selama 20 dekade terakhir, komunitas internasional telah meningkat sehingga saling terhubung dan berpengaruh yang disebabkan karena proses cepatnya teknologi dan perkembangan proses integrasi ekonomi. Organisasi Internasional memiliki sejarah yang panjang. Hal ini dapat diambil dari peradaban Yunani. Walaupun hal ini telah berkembang sampai peradaban pencerahan. Bagaimanapun studi empiris menunjukkan bahwa penelitian tentang organisasi internasional tidak mulai pada abad 19. Bentuk modern dari organisasi internasional dimulai dengan perjanjian di Utrecht, Belanda pada tahun 1713 dan Vienna, Austria di tahun 1815 yang terurai dalam prinsip perjanjian damai. Tujuan dari dibentuknya organisasi internasional ialah untuk membangun kerjasama antara negara dan warga negara untuk kesejahteraan dan pertukaran bisnis komoditas.

Secara tradisional, organisasi internasional dibentuk untuk mencapai tujuan politik setiap negara. Secara historis, studi organisasi internasional menjelaskan organisasi formal dan perannya untuk mengatasi beberapa isu dari area kerjasama internasional dari pandangan politik. Menurut pendapat Archer, Istilah “International Organization” pertama kali digunakan oleh Professor James Lorimer dari Inggris pada tahun 1867. Ilmuwan

politik menjelaskan organisasi internasional dalam beberapa bentuk seperti hubungan internasional, pemerintahan dan dinamika kekuatan. Dalam menjelaskan masyarakat, mereka menggunakan pendekatan historis seperti kekuatan dan wewenang mencakup penghargaan dan hukuman. Organisasi internasional pun dapat dikatakan sebagai komunitas politik.

Menurut Wight politik internasional merupakan bidang pengalaman manusia dengan karakteristik, masalah, dan bahasanya yang khas. Mempelajari hubungan internasional berarti memasuki tradisi ini, bergabung dalam percakapan dan mencerminkannya dalam pengalaman dengan tujuan memahaminya dalam istilah akademis yang tepat. Poin substantif pendekatan ini adalah bahwa hubungan internasional harus dipahami sebagai suatu masyarakat dari negara-negara yang saling dikenal dan bukan sekedar sebagai sistem kekuatan yang berkompetisi dan berkonflik. Ia berbeda dari masyarakat lain karena mempunyai negara berdaulat sebagai intinya, meskipun bukan keanggotaan yang eksklusif (Jackson, 2013). Pendekatan Masyarakat Internasional tradisional berusaha menghindari pilihan sebenarnya antara egoisme dan konflik negara serta niat baik manusia dan kerjasama yang ditampilkan oleh perdebatan antara realisme dan liberalism. Di satu sisi, para pakar Masyarakat Internasional menolak pandangan pesimis kaum realis klasik tentang negara sebagai organisasi politik yang berdikari dan berhubungan dengan diri sendiri yang saling berkaitan dan berhadapan satu sama lain hanya pada basis instrumental tentang kepentingan pribadi yang dangkal.

Hubungan Internasional merupakan sistem negara yang tidak berubah yang cenderung mengulang perselisihan, konflik dan cepat atau lambat akan menimbulkan perang. Di sisi lain, mereka menolak pandangan optimis kaum liberal klasik tentang hubungan internasional sebagai komunitas negara berkembang yang selalu bergerak ke arah kemajuan manusia dan perdamaian abadi yang tidak parallel pada suatu kondisi yang akan semakin tidak dapat dibedakan dari perdamaian dan kemakmuran domestik. Tradisi masyarakat internasional merupakan jalan tengah dalam keilmuan klasik hubungan internasional. Tradisi Masyarakat Internasional menempati posisi antara realisme klasik dan liberalisme klasik dan membangun tempat tersebut menjadi pendekatan hubungan internasional yang terpisah dan tersendiri. Tradisi tersebut menganggap hubungan internasional sebagai masyarakat negara, dimana aktor utamanya adalah negarawan yang ahli dalam praktik ketatanegaraan.

Tradisi ini memandang ketatanegaraan sebagai aktivitas manusia yang sangat penting yang mencakup kebijakan luar negeri, kebijakan militer, kebijakan perdagangan, komunikasi diplomatik, pengumpulan data intelijen dan mata-mata, membentuk dan menggabungkan aliansi militer, mengancam atau terlibat dalam penggunaan kekuatan bersenjata, bernegosiasi, dan menandatangani pakta perdamaian dan memasuki perjanjian perdagangan, bergabung dan berpartisipasi dalam organisasi internasional, dan terlibat dalam kontak, interaksi, transaksi dan pertukaran internasional yang tak terhitung. Sejauh ini pembahasan tersebut dapat dirangkum: hubungan internasional terdiri dari kebijakan

berorientasi luar negeri, keputusan dan aktivitas negarawan yang bertindak atas nama sistem politik yang berbasis wilayah yang merdeka satu sama lain dan tunduk bukan pada otoritas yang lebih tinggi daripada dirinya yaitu negara berdaulat.

Organisasi Internasional, organisasi non-pemerintah, perusahaan multinasional dan seterusnya adalah organisasi penting yang juga terlibat dalam hubungan internasional. Akan tetapi, mereka berada di bawah negara berdaulat. Mereka tidak dapat bertindak sepenuhnya merdeka dari negara-negara tersebut. Itulah sebabnya mengapa teoritisasi masyarakat internasional menganggap negara berdaulat menjadi fondasi politik dunia. Politik internasional dipahami sebagai cabang politik khusus yang kekurangan otoritas hierarki yaitu tidak terdapat pemerintah dunia yang berada di atas negara-negara yang berdaulat. Se jauh itu, para pakar masyarakat internasional sependapat dengan kaum realis klasik. Namun, masih ada kepentingan umum, aturan, institusi dan organisasi yang diciptakan dan dibagi bersama oleh negara-negara dan membantu untuk membentuk hubungan negara-negara. Kondisi sosial internasional dirangkum oleh Hedley Bull (1995) dengan frasa masyarakat anarki : tatanan sosial negara-negara merdeka di seluruh negara. Bull membuat perbedaan penting antara sistem internasional dan masyarakat internasional.

Negara-negara berkembang semakin mencapai kemajuan luar biasa dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Lebih jauh lagi, dengan perluasan teknologi komunikasi dan perdagangan yang cepat,

globalisasi sekarang menjadi kekuatan integrasi yang kuat. Namun pada saat yang sama konflik, pemindahan, degradasi lingkungan, perubahan iklim, krisis keuangan dan kemiskinan kronis yang berlanjut. Kesenjangan antara kaya dan miskin telah tumbuh baik diantara negara-negara tetangga maupun didalam negara. Membawa keputusan dan harapan yang kurang untuk dunia yang lebih adil. Sehingga dapat memenuhi komitmen internasional seperti tujuan *Millenium Development Goals* (MDG's) dan berkontribusi terhadap keamanan manusia. UNCRD melakukan kegiatan untuk membangun ekonomi dan sosial dan konteks pembangunan regional.

B. Sejarah Berdirinya UNCRD

Selama periode pelaporan, kegiatan Unit Pengembangan Ekonomi dan Sosial telah difokuskan pada tiga bidang berikut, manajemen perkotaan yang berkelanjutan, perencanaan pembangunan regional terpadu, dan keamanan manusia (dimensi sosial) mengenai manajemen perkotaan. Manual Shanghai berasal dari *Shanghai World Expo* telah dikembangkan sebagai alat panduan praktis oleh divisi untuk *Division for Sustainable Development* (DSD) dari *United Nation Department of Economic and Social Affairs* (UN DESA) dalam kerjasama dengan kota Shanghai dan bekerjasama dengan sejumlah badan PBB dan antar organisasi nasional. Manual Shanghai digunakan oleh UNCRD untuk menyelenggarakan pelatihan kursus di Nagoya pada bulan November untuk para pemimpin kota di negara-negara Asia, termasuk wali kota, wakil wali kota, dan kepala departemen kota dengan otoritas pengambilan keputusan untuk pembangunan perkotaan bekerja sama

dengan Program Pemukiman Manusia PBB (UN Habitat), *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dan DSD. Kursus pelatihan pertama menggunakan Manual Shanghai dan pelatihan serupa untuk Afrika, Amerika Latin dan Karibia (LAC) sedang direncanakan oleh kantor regional masing-masing.

Pada bidang pengembangan regional terpadu, Manual Shanghai melakukan dua kursus pelatihan seperti, kursus pelatihan internasional ke tiga puluh sembilan dalam pengembangan regional *International Training Course* (ITC) yang telah menjadi andalan kegiatan pelatihan pusat dan kursus pelatihan baru untuk Negara bagian Oromia, Ethiopia. Program ITC terus direstrukturisasi dan diperbarui untuk mencerminkan masalah kontemporer serta kebutuhan pelatihan saat ini di negara-negara berkembang. Mempertimbangkan tantangan baru-baru ini yang disajikan oleh urbanisasi yang cepat dan akan diadakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pembangunan berkelanjutan (UNCSD / Rio+), ITC memeriksa pendekatan pembangunan regional ekonomi hijau untuk menangani pengentasan kemiskinan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan membangun ekonomi rendah karbon tidak hanya di perkotaan, tetapi juga dalam konteks regional dan pedesaan.

Kursus pelatihan baru diinisiasi di Nagoya untuk wilayah Oromia, dimana bekerjasama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dan Pusat Pengembangan Internasional untuk Jepang dengan tujuan memperkuat perencanaan multi-sektoral dan kapasitas anggaran pejabat pemerintah di tingkat negara pada zona

Wareda di Oromia. Mengenai keamanan manusia (dimensi sosial), UNCRD terus mempromosikan program pelatihan kolaboratif dengan JICA menggunakan pendekatan pengembangan wilayah endogen *The European Network for Rural Development* (ENRD). Pendekatan ini telah memasukkan sudut pandang keamanan manusia terutama ketika menargetkan *LAC* dan *Central Asia*. Pendekatan ini memiliki fungsi untuk memberdayakan orang miskin, membatasi kesenjangan yang ada dan mempromosikan pembangunan yang seimbang dalam jangka panjang. Unit Pengembangan Ekonomi dan Sosial menerima dukungan tambahan untuk kegiatannya dari berbagai entitas termasuk Jaringan Nasional Otoritas Lokal untuk Manajemen Pemukiman Manusia (CITYNET) dan Yayasan Tokai Nagoya Cabang untuk dukungan PBB.

C. Lingkup Kerja UNCRD

Unit Lingkungan UNCRD telah mempertahankan fokusnya pada dua masalah perkotaan yakni, Environmentally Sustainable Transportation (*EST*) dan manajemen 3Rs limbah dalam konteks pengelolaan kota yang berkelanjutan. Tujuan kedua program tersebut pada umumnya adalah memberikan dukungan untuk perumusan dan penerapan strategi nasional *EST* serta mengutamakan strategi dalam kebijakan nasional dan membentuk dan mengatur Forum Regional *EST / R* untuk memberikan saran kebijakan strategis dan platform pengetahuan untuk berbagi pengalaman, praktik terbaik, instrument kebijakan, dan teknologi. Selain itu unit ini telah memberikan dukungan koordinasi global untuk Kemitraan Internasional untuk Memperluas Layanan Pengelolaan Limbah dan Otoritas Lokal (*IPLA*) yang

diluncurkan selama sesi kesembilan belas Komisi untuk Program Berkelanjutan (United Nations Centre for Regional Development, 2012).

Semua kegiatan ini dimaksudkan untuk berkontribusi pada prioritas dan komitmen lingkungan internasional yang dibahas dalam Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), Rencana Implementasi Johannesburg (*JPOI*) dan hasil Rio + serta menanggapi peningkatan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dan tantangan lingkungan yang dihadapi banyak kota di negara-negara berkembang di tengah pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat. Unit Lingkungan UNCRD telah memberikan bantuan teknis yang diperlukan untuk negara-negara berkembang secara efektif mengimplementasikan pendekatan *Environmentally Sustainable Transportation (EST)* dan langkah-langkah *Rs (Reduce, Reuse and Recycle)* di tingkat lokal, nasional, regional, dan global serta memperkuat kemitraan di bawah *IPLA* bekerjasama dengan berbagai mitra.

Unit Lingkungan menerima dukungan tambahan untuk kegiatannya dari berbagai entitas termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Jepang, Kementerian Pembangunan Perkotaan, Pemerintah India dan Institut Transportasi Perkotaan India, *National Environment Agency (NEA)*, Pemerintah Singapura; Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Republik Korea; *World Health Organization Regional Office for Western Pasific Region (WHO/WPRO)*; *Clean Air Initiative Asia (CAI-Asia)*; *International Solid Waste Association (ISWA)* dan *Associação Brasileira de*

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), Brazil; Regional Solid Waste Exchange of Information and Expertise Network in Mashreq and Maghreb Countries (SWEEP-Net) dan German International Cooperation (GIZ); The Institute for Global Environment Strategies (IGES); Economic Research Institute for Asian and East Asia (ERIA); World Health Organization Regional Office for South East Asia (WHO/SEARO); The United Nation Industrial Development Organization (UNIDO); Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO); Kementerian Lingkungan Hidup, Government of German and Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) India (United Nations Centre for Regional Development, 2012).

UNCRD menyelenggarakan lokakarya yang terdiri dari serangkaian lokakarya pertemuan diskusi dan kunjungan lapangan di tiga prefektur di wilayah Tohoku (Iwate, Miyagi dan Fukushima) dari Februari hingga Maret. Wilayah Tohoku sangat terpengaruh oleh wilayah Jepang Timur. Gempa dan tsunami yang melanda wilayah Jepang pada akhirnya semua kota telah menyerahkan rencana rekonstruksi yang dirumuskan dalam proses partisipatif. Pekerjaan pemulihan telah berkembang dan beralih ke rekonstruksi. Meskipun bekas luka akibat bencana belum sepenuhnya pulih, kegiatan rekostruksi secara bertahap telah berkembang.

Lokakarya bertema “Rekonstruksi Menuju Masyarakat Berkelanjutan; Promosi Industri Berbasis Lokal dengan Pendekatan Semua Pemangku Kebijakan”. Lokakarya ini terdiri dari kunjungan lapangan dan

pertemuan diskusi dengan kota dan masyarakat setempat yang memiliki tujuan beragam. Tujuan utamanya adalah untuk belajar dari pengalaman masyarakat yang terkena dampak atas upaya untuk menuju rekonstruksi. Dengan mengadakan pertemuan diskusi dengan perwakilan lokal, UNCRD berharap bahwa kelompok ahli yang berkumpul untuk lokakarya ini akan terlibat dalam pertukaran informasi dan ide-ide praktis yang dapat membantu upaya masyarakat setempat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Selain itu, selama periode ini Unit Perencanaan Manajemen Bencana telah dimasukkan kembali ke kantor UNCRD Nagoya, dimana tim baru sedang mengembangkan program baru setelah pengalaman selama dua belas tahun di kantor Hyogo.

Selama dekade terakhir, Afrika telah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Beberapa ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia berada di Afrika. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang luar biasa ini tidak mengalir ke mayoritas masyarakat miskin dan tidak membantu mengurangi kemiskinan. Program penelitian dan pelatihan UNCRD dirancang untuk mewujudkan keadilan distributif, pemulihan ekonomi, tata pemerintahan yang baik dan pembangunan regional berkelanjutan di Afrika. Pimpinan pusat percaya bahwa tujuan utama pembangunan haruslah untuk memastikan bahwa semua orang menikmati standar hidup yang lebih tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di Afrika harus berupaya tidak hanya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tetapi juga untuk menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi dan keadilan distributif.

Kebijakan pembangunan regional di Afrika akan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan sosial dan kepedulian lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia yang berkelanjutan. Tidak ada bangsa yang harus mengorbankan kemajuan sosial dan keadilan sosial hanya untuk tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Demikian pula tidak ada negara yang harus terlalu menekankan masalah sosial dan menghabiskan lebih banyak pada pembangunan sosial daripada kapasitas ekonomi. Pada setiap tahap pembangunan, keseimbangan harus dicapai antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial untuk memastikan bahwa dua aspek penting pembangunan akan saling melengkapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kebijakan regional di Afrika harus secara jelas menyesuaikan isu keadilan. Ekuitas tidak hanya dalam hal pendapatan tetapi juga dalam arti yang lebih luas dalam menyediakan kapasitas dasar dan peluang bagi semua.

Pembangunan daerah juga harus fokus pada keamanan manusia karena perhatian utama keamanan manusia termasuk melindungi masyarakat yang dilanda konflik kekerasan, menangani kebutuhan manusia dan rekonstruksi pasca-konflik. Fokusnya adalah memastikan keamanan ekonomi dan meningkatkan layanan dasar. Selain itu, mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mencapai keamanan manusia. Tujuan utama dari program UNCRD Afrika adalah untuk memberikan keamanan manusia prioritas tertinggi dalam agenda pembangunan regional.

Afrika juga harus berurusan dengan urbanisasi yang berkembang pesat. Wilayah perkotaan di Afrika menjadi tuan rumah Lembaga pemerintah dan sektor swasta. Sektor-sektor ini berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan. Menurut UN-Habitat, wilayah perkotaan menyumbang sekitar persen dari produk domestik bruto (PDB) Afrika. Karena itu mereka memainkan peran penting dalam produksi barang dan jasa, selain menghasilkan lapangan kerja bagi populasi perkotaan yang terus tumbuh. Sayangnya, urbanisasi di Afrika tidak disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi atau peningkatannya standar hidup. Ini adalah fenomena unik, dimana Bank Dunia menyebutkan “urbanisasi tanpa pertumbuhan. Oleh karena itu, UNCRD Afrika harus mengintegrasikan masalah perkotaan ke dalam proyek dan programnya untuk membantu negara-negara Afrika dengan tantangan yang mereka hadapi di bidang ini.

Tantangan besar lainnya yang dihadapi Afrika adalah masalah perubahan iklim. Selain menjadikan pertanian tradisional di negara-negara Afrika kurang menguntungkan, perubahan iklim telah mendorong sejumlah besar orang ke kota-kota ketika mereka mencari mata pencaharian alternatif. Dengan meningkatnya frekuensi kekeringan, banjir, variasi curah hujan dan kenaikan permukaan laut yang terkait dengan perubahan iklim, produksi pertanian akan menurun dan kerawanan pangan dan gizi buruk akan memburuk. Ini juga menjadi area prioritas UNCRD Afrika. Program penelitian dan pelatihan UNCRD Afrika dirancang untuk mengatasi masalah-masalah lainnya untuk mendukung negara-

negara Afrika dalam mencapai pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan jangka panjang melalui kebijakan dan strategi pembangunan regional yang efektif.

Simposium publik yang diselenggarakan oleh UNCRD dan *United Nations University Institute of Advanced Studies (UNU-IAS)* memiliki tujuan untuk mengadakan diskusi public tentang masalah-masalah dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan peran yang dapat dimainkan Jepang dalam mendorong transisi global menuju kota yang lebih berkelanjutan. Populasi dunia diperkirakan telah meningkat menjadi miliaran populasi dan populasi yang tinggal di daerah perkotaan diperkirakan akan bertambah. Tidak dapat dihindari bahwa peningkatan populasi perkotaan yang cepat ini akan membawa peningkatan besar dalam tatanan ekonomi, sosial dan lingkungan yang mengakibatkan perlunya bagi pemerintah untuk mengambil tindakan segera. Selain itu, urbanisasi berkelanjutan akan menjadi salah satu sub-tema utama yang harus ditangani di Rio+ karena banyak ahli menganggap bahwa di kota-kota di mana pertempuran untuk pembangunan berkelanjutan akan menang atau kalah. Debat ini diharapkan tidak hanya untuk berkontribusi pada Rio+, tetapi juga menjadi forum diskusi tentang bagaimana kota dan mitra mereka dapat berhasil mengimplementasikan hasil konferensi. Karena laporan pertemuan ini diperlakukan sebagai kontribusi nyata terhadap Konferensi PBB tentang *United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD)* yang akan datang dengan solusi berwawasan ke depan untuk tantangan perkotaan dari Rio +. Simposium terdiri dari

tiga bagian. Diskusi dilakukan dengan tema “Pengelolaan Kota Berkelanjutan” di bagian pertama. “Manajemen Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan” di bagian kedua. Bagian terakhir terdiri dari presentasi studi kasus Kota Kitakyushu oleh pejabat kota Kitakyushu untuk menggambarkan pengalaman Kitakyushu tentang promosi kota berkelanjutan sebagai perwakilan dari contoh tingkat kota di Jepang.

Dalam dukungan lebih lanjut dari Rio +, UNCRD membuat komitmen sukarela di empat bidang yakni *Environmentally Sustainable Transport (EST)*, *Rs (Reduce Reuse and Recycle)*, *International Partnership for Expanding Waste Management Services of Local Authorities (IPLA)* dan *Regional Development*. Mitra Komitmen yang telah disepakati sebagai berikut, The Asian Institute of Technology (AIT), ADB, AMC (India), Bogota-Cundinamarca Region-Columbia, Clean Air Initiative for Asian Cities (CAI-Asia), Dutch Cycling Embassy, EMBARQ, GIZ, Griffith University, IEA, IGES, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), the International Urban Development Association of INTA, ILand FS, ISWA-Brazil, JICA, Korean Society of Waste Management, KOTI, MoE-Japan, MoE-Republic of Korea, the Network of Regional Governments for Sustainable Development (NRG SD), the Latin American Organization of Intermediate Governemnts (OLAGI), Regions United (ORU-FOGAR), The Prefecture of Azuay-Ecuador, Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe, SACEP, SLoCat, SPREP, SWEEP-Net, TRL, University of the Southern Caribbean (Trinidad & Tobago), the UNESCO Chair on Human Security and Regional

Development, UN-Habitat, WHO/WPRO, Zero Waste SA (Australia) dan nongovernmental organizations (NGOs).

UNCRD memiliki empat fokus yakni mempromosikan *Environmentally Sustainable Transportation* (EST), mengutamakan 3R dan efisiensi sumber daya dalam pengembangan kebijakan secara keseluruhan di tingkat lokal dan nasional di negara-negara Asia Pasifik, mempromosikan kemitraan internasional untuk *International Partnership on Expanding Waste Management Services of Local Authorities* (IPLA) dan mempromosikan pembangunan wilayah berkelanjutan. Tujuan utama dari proyek Transportasi Berkelanjutan yang Ramah Lingkungan adalah untuk mempromosikan integrasi pertimbangan lingkungan di sektor transportasi di Asia.

D. Peran UNCRD dalam Implementasi Kebijakan 3Rs

Selanjutnya program 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) memiliki tujuan untuk memberikan saran kebijakan strategis otoritas pemerintah pusat dalam menerapkan 3Rs. *International Partnership for Expanding Waste Management Services of Local Authorities* (IPLA) memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas otoritas lokal untuk pengelolaan limbah berkelanjutan menuju masyarakat yang efisien sumber daya dan tanpa limbah hingga mencapai kota yang layak huni dan berkelanjutan. UNCRD akan mempromosikan daerah berkelanjutan di negara-negara berkembang bekerjasama dengan mitra terkait untuk mencapai pembangunan daerah berkelanjutan dan berkontribusi

untuk mempromosikan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Minat dalam pengelolaan limbah di kalangan pembuat kebijakan telah meningkat di kawasan Asia Pasifik selama dekade terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan diluncurkannya Forum 3R Regional di Asia dan Pasifik pada tahun 2009 serta berbagai contoh dukungan politik dari berbagai negara yang bertujuan mengembangkan strategi nasional pada 3R dengan maksud untuk mengintegrasikan inisiatif 3R ke dalam lingkungan nasional. Pengelolaan limbah dan kebijakan atau strategi terkait 3R di kawasan Asia Pasifik dirangkum dalam Tabel 1-1 dan kerangka hukum kebijakan terkait 3R dalam kebijakan pengelolaan limbah dirangkum dalam Tabel 1-2 yang terlampir di lampiran 1-2 pada halaman 72-82 (United Nations Centre for Regional Development, 2017).

Dalam menganalisis informasi yang disajikan dalam 12 laporan yang mendokumentasikan praktik 3R di kawasan Asia dan Pasifik, Jepang berada pada tahap terdepan dengan pengembangan kebijakan 3R nasional. Negara ini memiliki kebijakan yang komprehensif mulai dari kebijakan kerangka kerja keseluruhan hingga kebijakan daur ulang dan undang-undang khusus produk dalam hal manajemen akhir. Kemajuan yang dibuat sehubungan dengan implementasi kebijakan telah dipantau terhadap berbagai tujuan dan indikator yang ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, kerangka kerja legislatif di negara ini berevolusi menuju kebijakan dan praktik pengelolaan limbah yang menggabungkan perlindungan lingkungan dan kesehatan manusia sambil

memanfaatkan keuntungan ekonomis dan strategis serta mengejar konsep keberlanjutan dengan memperkenalkan dan mempromosikan kebijakan 3R.

Ekonomi pasar yang sedang tumbuh seperti China, India, Malaysia, Filipina dan Vietnam juga telah mulai mengembangkan undang-undang dan kebijakan terkait 3R dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah negara kepulauan Pasifik kecil seperti Palau juga telah mengembangkan undang-undang dan kebijakan serupa. Referensi dibuat untuk pengelolaan limbah dalam kebijakan lingkungan dasar dari negara-negara tersebut serta kebijakan kerangka keseluruhan tentang pengelolaan limbah termasuk daur ulang dan 3R. Namun, sejumlah kesenjangan dapat diidentifikasi dalam kebijakan ini termasuk kebutuhan untuk meningkatkan penekanan pada kebijakan 3R.

Dalam kasus China, baik keterkaitan dan keterpaduan antar hukum yang berbeda perlu ditimbangkan dan diatasi lebih lanjut. Misalnya, Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan tentang limbah padat memperkenalkan penerapan kebijakan 3R untuk limbah padat kota, limbah industri dan limbah berbahaya. Hal ini mengahruskan pengurangan jumlah limbah, daur ulang limbah padat dan pembuangan yang tidak berbahaya. Di sisi lain, UU Promosi Ekonomi Sirkular memperkenalkan penerapan kebijakan 3R sebagai pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang. Pada saat yang sama, sekitar setengah dari ekonomi di wilayah tersebut tidak memiliki undang-undang khusus terkait dengan limbah konstruksi dan pembongkaran, limbah elektronik dan limbah makanan.

Oleh karena itu, kesenjangan ini perlu ditangani dalam waktu dekat.